

## Dampak Korupsi terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional

Kessya Cahya Malika; Yavina Anna Putri Ramadhanti; Aflaha Oinori Hafina; Siti Aisha Nur Ramadhani, Universitas Trisakti.  
[kesyachya16@gmail.com](mailto:kesyachya16@gmail.com)

*ABSTRACT: Corruption remains one of the most significant obstacles to sustainable economic development in Indonesia. Despite the country's abundant natural resources and large market potential, corruption continues to undermine economic growth, undermine social welfare, and hinder equitable resource allocation. This study aims to explore in depth how corruption affects the economic development process in Indonesia, highlighting the underlying social, institutional, and structural dynamics. Using a qualitative descriptive approach, this study relies on analysis of various scientific literature, policy documents, international agency reports, and mass media to identify patterns and impacts of corruption on vital sectors such as infrastructure, education, and health. The analysis shows that corruption exacerbates social inequality, weakens governance, and undermines the foundations of sustainable development. This study emphasizes the importance of transparency, strict law enforcement, and public participation as key strategies in eradicating corruption and promoting equitable and inclusive economic development.*

*Keywords: Corruption; Economic Development; Social Inequality.*

**ABSTRAK:** Korupsi tetap menjadi salah satu hambatan paling signifikan bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Meskipun negara ini memiliki sumber daya alam yang melimpah dan potensi pasar yang besar, korupsi terus melemahkan pertumbuhan ekonomi, mengganggu kesejahteraan sosial, dan menghambat alokasi sumber daya secara adil. Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam bagaimana korupsi memengaruhi proses pembangunan ekonomi di Indonesia, dengan menyoroti dinamika sosial, kelembagaan, dan struktural yang melatarbelakanginya. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengandalkan analisis terhadap berbagai literatur ilmiah, dokumen kebijakan, laporan lembaga internasional, dan media massa untuk mengidentifikasi pola dan dampak korupsi terhadap sektor-sektor vital seperti infrastruktur,

pendidikan, dan kesehatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa korupsi memperburuk ketimpangan sosial, melemahkan tata kelola pemerintahan, dan merusak fondasi pembangunan berkelanjutan. Studi ini menekankan pentingnya transparansi, penegakan hukum yang tegas, dan partisipasi publik sebagai strategi utama dalam memberantas korupsi dan mendorong pembangunan ekonomi yang adil dan inklusif.

Kata Kunci: Korupsi; Pembangunan Ekonomi; Ketimpangan Sosial.

## I. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu masalah utama yang menghambat pembangunan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Praktik korupsi di sektor publik dan swasta tidak hanya menciptakan ketidakadilan sosial, tetapi juga menurunkan kualitas pemerintahan dan berpotensi merusak pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi telah menjadi topik yang banyak diteliti oleh para akademisi dan praktisi. Korupsi dapat memperburuk kualitas infrastruktur, mengurangi investasi asing, dan meningkatkan ketimpangan ekonomi, yang pada gilirannya memengaruhi kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Seiring dengan berjalannya waktu, fenomena ini semakin mengancam kemajuan ekonomi negara, terutama dalam konteks globalisasi yang semakin kompetitif. Akman dan AH (2018) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa korupsi di Indonesia memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Dengan kata lain, tingginya tingkat korupsi dapat menyebabkan pemborosan sumber daya negara, yang seharusnya dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan sektor vital lainnya. Korupsi mengarah pada pengalokasian sumber daya yang tidak efisien dan memperburuk iklim investasi. Investasi asing menjadi enggan masuk ke negara dengan tingkat korupsi yang tinggi karena ketidakpastian dan risiko yang lebih besar.

Oleh karena itu, korupsi dapat memperlambat pembangunan ekonomi dengan mengurangi aliran dana yang diperlukan untuk

mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Al Hazmi (2023) menunjukkan bahwa korupsi mempengaruhi distribusi pendapatan dan ketimpangan sosial. Praktik korupsi cenderung menguntungkan pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuasaan atau akses terhadap sumber daya publik, sementara masyarakat umum yang tidak terlibat dalam jaringan tersebut mengalami kesulitan dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini menyebabkan ketimpangan sosial yang semakin melebar, menghambat distribusi kesejahteraan yang adil di seluruh lapisan masyarakat. Korupsi juga memperburuk pemerintahan yang baik (*good governance*), yang seharusnya mampu memberikan pelayanan publik yang efisien dan adil. Salah satu aspek penting yang perlu dibahas adalah dampak korupsi terhadap sektor pembangunan infrastruktur. Irawan (2022) mengungkapkan bahwa proyek infrastruktur sering menjadi sarana yang rentan terhadap praktik korupsi. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur berkualitas sering kali diselewengkan oleh pejabat yang tidak bertanggung jawab.

Hal ini mengakibatkan pembangunan infrastruktur yang terbengkalai atau tidak sesuai dengan standar kualitas yang dibutuhkan, yang pada akhirnya menghambat mobilitas ekonomi dan pertumbuhan industri. Dampak ini sangat terasa di daerah-daerah terpencil yang kesulitan memperoleh akses ke infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Dampak korupsi juga dapat terlihat dalam sektor sosial dan lingkungan. Fernanda et al. (2023) menjelaskan bahwa korupsi memperburuk dampak sosial dan lingkungan dari pembangunan ekonomi. Praktik korupsi di sektor sumber daya alam, misalnya, dapat menyebabkan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam yang merusak ekosistem dan menyebabkan kerugian jangka panjang. Selain itu, ketimpangan dalam distribusi sumber daya mengarah pada perbedaan akses masyarakat terhadap sumber daya alam yang ada. Korupsi yang terjadi di sektor lingkungan menghalangi implementasi kebijakan keberlanjutan, sehingga mengancam masa depan ekonomi negara dalam jangka panjang. Fenomena korupsi di Indonesia semakin diperburuk dengan adanya lemahnya penegakan hukum. Lamijan dan Tohari (2022)

mencatat bahwa meskipun Indonesia memiliki undang-undang anti-korupsi yang cukup ketat, penerapannya masih seringkali tidak optimal. Banyak kasus korupsi yang tidak sampai ke pengadilan atau malah mendapat hukuman yang sangat ringan. Ini menunjukkan adanya celah dalam sistem hukum yang memungkinkan praktik korupsi terus berlanjut tanpa ada efek jera bagi pelaku. Selain itu, korupsi dalam birokrasi pemerintah dan sektor swasta juga dipicu oleh rendahnya integritas moral dari para pemimpin, yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan negara. Pencegahan korupsi menjadi kunci utama dalam upaya mempercepat pembangunan ekonomi di Indonesia. Fendlyta (2024) mengusulkan berbagai strategi untuk memerangi korupsi, termasuk reformasi sistem hukum, penguatan lembaga pengawasan, dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara.

Penguatan peran lembaga anti-korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga sangat penting agar kasus korupsi dapat ditangani dengan tegas dan transparan. Selain itu, masyarakat juga perlu diberdayakan agar lebih kritis terhadap praktik-praktik korupsi yang ada, serta berpartisipasi dalam menjaga integritas pemerintahan. Lutfi et al. (2020) juga menekankan pentingnya peran sektor swasta dalam memerangi korupsi. Perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Indonesia perlu memiliki kebijakan anti korupsi yang jelas dan memastikan bahwa seluruh operasional bisnis dijalankan dengan integritas tinggi. Kolaborasi antara sektor publik dan swasta, serta masyarakat, diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Penegakan hukum yang lebih kuat dan kesadaran bersama tentang bahaya korupsi diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih baik, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Korupsi bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosial, politik, dan budaya.

Putri et al. (2024) mengungkapkan bahwa dalam jangka panjang, korupsi dapat merusak fondasi moral dan etika suatu negara. Negara yang terus-menerus terjebak dalam lingkaran korupsi akan kesulitan membangun masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Oleh karena

itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Dalam konteks ASEAN, Syahirah (2024) menjelaskan bahwa korupsi juga berpengaruh terhadap integrasi ekonomi regional. Negara-negara di kawasan ini menghadapi tantangan serupa terkait dengan tingkat korupsi yang berbeda-beda. Kolaborasi antarnegara dalam memperkuat kerangka hukum anti-korupsi di kawasan ASEAN sangat penting agar pembangunan ekonomi di kawasan ini dapat berjalan dengan baik dan tidak terhambat oleh praktik korupsi yang merugikan. Secara keseluruhan, dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia sangat besar dan kompleks. Korupsi tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik. Untuk itu, upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Sebagai langkah awal, penguatan sistem hukum dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara merupakan langkah penting untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

## II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam, menyeluruh, dan kontekstual mengenai dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena topik yang diteliti—yaitu korupsi dan pembangunan ekonomi—merupakan isu yang kompleks, multidimensi, dan tidak dapat sepenuhnya dipahami hanya melalui angka atau data statistik semata. Korupsi tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga secara sosial, politik, budaya, dan kelembagaan. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dinilai paling tepat karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi realitas sosial dan dinamika yang melatarbelakangi fenomena korupsi melalui penelaahan makna, konteks, dan interaksi antara berbagai aktor dan sistem yang terlibat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, yaitu data yang sudah tersedia dan dipublikasikan oleh pihak lain. Data dikumpulkan melalui studi pustaka (library research), dengan cara menelaah literatur-literatur yang relevan dari berbagai sumber terpercaya, seperti jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan (Badan Pusat Statistik, Komisi Pemberantasan Korupsi, Transparency International, Bank Dunia, IMF), dokumen kebijakan publik, serta artikel dan laporan media massa. Kriteria utama dalam pemilihan data sekunder adalah relevansi dengan topik penelitian, kredibilitas sumber, dan kemutakhiran data. Dalam hal ini, peneliti hanya menggunakan sumber-sumber yang diterbitkan dalam rentang waktu lima tahun terakhir untuk memastikan bahwa data yang dianalisis mencerminkan kondisi dan dinamika terkini.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri tema-tema utama yang berkaitan langsung dengan pertanyaan penelitian, seperti hubungan antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi, dampak korupsi terhadap ketimpangan sosial, korupsi dalam sektor infrastruktur dan sumber daya alam, serta efektivitas penegakan hukum dalam mencegah korupsi. Setiap dokumen yang ditemukan dianalisis secara mendalam dengan menggunakan teknik analisis tematik (thematic analysis). Teknik ini dilakukan dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasi tema-tema yang muncul secara berulang dalam berbagai sumber. Tahap pertama adalah reduksi data, di mana peneliti menyaring informasi yang relevan dan membuang bagian yang tidak sesuai dengan fokus penelitian. Kemudian, dilakukan kategorisasi, yaitu pengelompokan data berdasarkan kesamaan makna atau isu, seperti korupsi dalam kebijakan pendidikan, pengaruhnya terhadap investasi, atau persepsi masyarakat terhadap integritas lembaga publik. Selanjutnya, peneliti melakukan interpretasi terhadap temuan-temuan tersebut, dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan kelembagaan yang menyertainya.

### III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

#### A. Pengaruh Korupsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil kajian menunjukkan bahwa korupsi berdampak sistemik terhadap proses pembangunan ekonomi di Indonesia. Melalui penelaahan berbagai sumber literatur dan dokumen kebijakan, ditemukan bahwa praktik korupsi tidak hanya memperlambat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengganggu mekanisme alokasi sumber daya yang seharusnya efisien dan produktif. Dalam praktiknya, anggaran negara yang semestinya dialokasikan untuk sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, kerap kali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini menciptakan ketidakstabilan dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Beberapa studi, seperti yang diungkapkan oleh Akman dan AH (2018), memperlihatkan bahwa korupsi menyebabkan pemborosan anggaran dan memperlemah iklim investasi. Investor, baik dalam maupun luar negeri, menunjukkan kecenderungan untuk menghindari pasar yang memiliki risiko tinggi akibat praktik-praktik korupsi yang tidak terkendali. Kepercayaan terhadap institusi publik menjadi rendah, dan ini memperburuk performa ekonomi nasional secara keseluruhan.

#### B. Ketimpangan Sosial dan Korupsi

Dampak korupsi terhadap ketimpangan sosial juga sangat nyata. Berdasarkan analisis data ketimpangan sosial yang diukur dengan indeks Gini, ditemukan bahwa ketimpangan pendapatan di Indonesia semakin melebar seiring dengan meningkatnya tingkat korupsi. Hasil ini sejalan dengan penelitian Al Hazmi (2023), yang menunjukkan bahwa di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, distribusi kekayaan cenderung semakin terkonsentrasi di tangan segelintir orang, sementara sebagian besar masyarakat terpinggirkan. Korupsi dalam sektor publik, terutama dalam distribusi bantuan sosial dan alokasi anggaran pembangunan, memperburuk ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin. Proyek-proyek sosial yang dirancang untuk membantu

masyarakat miskin sering kali tidak sampai kepada mereka karena adanya penyalahgunaan anggaran oleh pejabat publik yang terlibat dalam praktik korupsi. Sebagai contoh, dalam sektor pendidikan dan kesehatan, korupsi telah menghambat distribusi sumber daya yang adil dan merata. Di sektor pendidikan, dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan sering kali dikorupsi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga sekolah-sekolah di daerah terpencil atau kurang berkembang tidak mendapatkan fasilitas yang memadai. Demikian pula di sektor kesehatan, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan rumah sakit dan penyediaan obat-obatan sering kali terhambat oleh praktik korupsi yang melibatkan pengadaan barang dan jasa. Ketimpangan akses terhadap layanan dasar ini semakin memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat Indonesia, yang pada gilirannya memperlebar kesenjangan antara kelompok yang memiliki akses terhadap sumber daya.

### C. Sektor Pembangunan yang Terdampak Korupsi

Korupsi juga memberikan dampak besar terhadap sektor-sektor pembangunan, terutama di bidang infrastruktur dan sumber daya alam. Dalam sektor infrastruktur, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, korupsi menyebabkan banyak proyek gagal atau tidak selesai dengan baik. Proyek-proyek besar yang melibatkan dana negara sering kali menjadi sarana penyalahgunaan anggaran, yang berujung pada pemborosan sumber daya dan kualitas proyek yang buruk. Hal ini menghambat pembangunan infrastruktur yang seharusnya dapat mendukung produktivitas ekonomi negara, seperti jalan raya, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Di sektor energi dan sumber daya alam, korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam seperti pertambangan, kehutanan, dan energi juga berkontribusi pada kerusakan lingkungan dan pemborosan sumber daya. Pengelolaan yang tidak transparan dan tidak akuntabel mengarah pada eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam yang seharusnya dapat dikelola secara berkelanjutan untuk mendukung pembangunan jangka panjang. Sektor-sektor ini, yang merupakan tulang punggung pembangunan ekonomi Indonesia,

seharusnya mendapatkan perhatian khusus dalam upaya pencegahan korupsi. Korupsi yang terjadi dalam sektor-sektor vital ini menyebabkan berkurangnya kualitas dan kuantitas hasil pembangunan, yang pada akhirnya berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi negara. Fenomena ini mengindikasikan pentingnya reformasi dalam pengelolaan anggaran pembangunan, pengawasan yang lebih ketat terhadap proyek-proyek besar, serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam dan energi.

#### D. Strategi untuk Mengurangi Dampak Korupsi

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa strategi perlu diterapkan untuk mengurangi dampak negatif korupsi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. Salah satunya adalah penguatan institusi hukum dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku korupsi. Seperti yang dijelaskan oleh Fendlyta (2024), meskipun Indonesia telah memiliki lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun penegakan hukum yang tegas dan berkelanjutan masih menjadi tantangan besar. Penegakan hukum yang lebih konsisten, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan anggaran dan proyek-proyek pembangunan, akan membantu mengurangi peluang bagi praktik korupsi untuk berkembang. Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran juga menjadi langkah penting. Dengan menggunakan teknologi informasi dan sistem digital yang memadai, pemerintah dapat memantau dan mengendalikan penggunaan dana publik dengan lebih efisien, mengurangi peluang untuk penyalahgunaan. Upaya ini harus diikuti dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan proyek-proyek pembangunan dan kebijakan-kebijakan publik. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan iklim yang bebas dari korupsi dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia sangat besar dan kompleks. Korupsi menghambat laju pertumbuhan ekonomi dengan merugikan sektor-

sektor vital seperti infrastruktur dan sumber daya alam, memperburuk ketimpangan sosial, dan merusak kualitas kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional Indonesia. Penguatan penegakan hukum, transparansi dalam pengelolaan anggaran, dan partisipasi aktif masyarakat adalah langkah-langkah penting untuk mengurangi dampak negatif korupsi dan mempercepat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Menurut Akman dan AH (2018:531) menyatakan bahwa "tingginya tingkat korupsi di Indonesia berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, karena menyebabkan pemborosan sumber daya yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan". Hal ini diperkuat oleh temuan Al Hazmi (2023:86) yang menunjukkan bahwa "korupsi berperan besar dalam memperlebar ketimpangan sosial dan distribusi pendapatan yang tidak adil. Dalam konteks infrastruktur", Irawan (2022) menyoroti bahwa proyek-"proyek yang didanai negara sering menjadi sarana penyalahgunaan anggaran, yang berdampak pada rendahnya kualitas pembangunan fisik nasional". Sementara itu, Fernanda dkk. (2023:77) menekankan bahwa "korupsi di sektor sumber daya alam memperburuk kondisi lingkungan dan menghambat pembangunan berkelanjutan". Selain lemahnya pengawasan, Lamijan dan Tohari (2022:44) mengungkapkan bahwa "penegakan hukum terhadap pelaku korupsi di Indonesia masih belum optimal, sehingga menciptakan celah hukum yang memungkinkan korupsi terus berlangsung". Fendlyta (2024:33) mengusulkan bahwa "pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui reformasi hukum, penguatan lembaga pengawasan, dan peningkatan transparansi dalam penggunaan anggaran. Upaya tersebut harus melibatkan sektor swasta", seperti yang dijelaskan Lutfi dkk. (2020:31), bahwa "perusahaan perlu memiliki kebijakan anti-korupsi yang jelas dalam praktik bisnisnya". Putri dkk. (2024:52) juga memperingatkan bahwa "korupsi yang meluas dapat merusak tatanan moral dan keadilan sosial dalam jangka panjang". Dalam lingkup internasional, Syahirah (2024:9) mencatat bahwa "negara-negara ASEAN juga

menghadapi tantangan serupa, sehingga diperlukan kerja sama regional untuk memperkuat kebijakan anti-korupsi di kawasan tersebut.”

#### IV. KESIMPULAN

Korupsi merupakan salah satu hambatan utama dalam pembangunan ekonomi nasional karena mengganggu alokasi sumber daya, mengurangi efisiensi kebijakan publik, serta merusak integritas sistem ekonomi secara keseluruhan. Dalam konteks ekonomi makro, korupsi memicu pemborosan anggaran negara dan mengalihkan dana dari proyek produktif ke kegiatan yang kurang bermanfaat. Akibatnya, investasi publik yang seharusnya diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan menjadi tidak optimal, sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Fenomena ini juga berdampak pada menurunnya kepercayaan investor, baik domestik maupun asing, terhadap iklim usaha dan kepastian hukum suatu negara. Ketika korupsi merajalela dalam sektor publik, proses perizinan menjadi tidak transparan dan biaya transaksi meningkat secara signifikan. Biaya-biaya tersebut bukan hanya menciptakan inefisiensi, tetapi juga menurunkan daya saing nasional di mata investor global. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menciptakan ekonomi biaya tinggi dan memperburuk ketimpangan distribusi pendapatan.

#### Saran

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk mengurangi dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Secara praktis, pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku korupsi melalui reformasi sistem hukum dan peningkatan efektivitas lembaga anti-korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengawasan terhadap proyek-proyek pembangunan, terutama infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam, harus ditingkatkan melalui sistem yang lebih transparan dan akuntabel.

Sementara itu, untuk arah penelitian lanjutan, disarankan agar studi mendatang mengintegrasikan analisis longitudinal dan komparatif antarnegara ASEAN guna memahami lebih luas dampak korupsi terhadap integrasi ekonomi kawasan. Penelitian juga dapat mengeksplorasi peran teknologi digital dalam mendorong partisipasi

masyarakat dalam pengawasan anggaran dan kebijakan publik secara real-time.

## DAFTAR REFERENSI

- Akman, B., & AH, D. S. (2018). Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 3(4), 531-538.
- Al Hazmi, R. (2023). Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *JURNAL ACITYA ARDANA*, 3(2), 85-92.
- Al Hazmi, R. A. (2024). Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnalku*, 4(1), 1-10.
- Fendlyta, N. R. M. (2024). Upaya Pencegahan Korupsi Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 6(10), 31-40.
- Fernanda, A., M Fauzi Yazid, S., & Silitonga, D. T. S. (2023). Korupsi Dan Pembangunan Berkelanjutan: Evaluasi Terhadap Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi, Sosial, Dan Lingkungan. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(5), 77-82.
- Irawan, R. (2022). Kajian Analisi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Akibat Korupsi Pasca Era Reformasi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis [JIMEIS]*, 2(4).
- Lamijan, L., & Tohari, M. (2022). Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan Pembangunan Politik. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 3(02), 40-59.
- Lutfi, A. F., Zainuri, Z., & Diartho, H. C. (2020). Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus 4 Negara di ASEAN. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 7(1), 30-35.
- Putri, A. N., Fernando, R., Putri, C. L., Alkasadi, S. M., & Nurrohmat, D. (2024). pengaruh korupsi dalam perkembangan ekonomi di indonesia. *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), 50-57.
- Syahirah, N. (2024). pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara asean (Doctoral dissertation, Universitas Malikussaleh).